



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022  
KE PROVINSI JAMBI  
18 s.d. 22 APRIL 2022**

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

**JAKARTA 2022**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI**  
**RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2021-2022**  
**KE PROVINSI JAMBI**  
**18 s.d. 22 APRIL 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jambi adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal April 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 16 Maret 2022.

**B. RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jambi adalah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

**C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jambi adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* dibidang kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pertanian, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Jambi;
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Jambi; serta

3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

## **II. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jambi dipimpin oleh Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) serta diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

## **III. PELAKSANAAN**

### **A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Jambi dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 22 April 2022. Kunjungan Kerja Panja dilakukan di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi, Sentra Produksi Nanas Desa Tangkit Baru, Kec. Sei Gelam, Kab. Muaro Jambi, Kantor DPRD Provinsi Jambi dan Lokasi Konflik Tanah di Desa Danau Lamo, Kec. Muarosebi, Kabupaten Muaro Jambi.

### **B. GAMBARAN UMUM PROVINSI JAMBI**

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Disebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan dan sebelah Barat dengan Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Bengkulu. Kondisi geografis yang cukup strategis di antara kota-kota lain di provinsi sekitarnya membuat peran provinsi ini cukup penting terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah. Kebutuhan industri dan masyarakat di kota-kota sekelilingnya didukung suplai bahan baku dan bahan kebutuhan dari provinsi ini.

Luas Provinsi Jambi 50.160,05 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2017 berjumlah 3.515.017 jiwa dengan kepadatan 70,08 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebelumnya ditahun 2010, provinsi ini memiliki populasi sebanyak 3.088.618 jiwa (Data BPS hasil sensus 2010). Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2006 berjumlah 2.683.289 jiwa (Data SUPAS Proyeksi dari BPS Provinsi Jambi). Jumlah Penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2005 sebesar 2.657.536 (data SUSENAS) atau dengan tingkat kepadatan 50,22 jiwa/km<sup>2</sup>. Tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,96% dengan PDRB per kapita Rp.9.523.752,00 (Angka sementara dari BPS Provinsi Jambi. Untuk tahun 2005, PDRB per kapita sebesar Rp8.462.353). Sedangkan sebanyak 46,88% dari jumlah tenaga kerja Provinsi Jambi bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan; 21,58% pada sektor perdagangan dan 12,58% pada sektor jasa. Dengan kondisi ketenagakerjaan yang sebagian besar masyarakat di provinsi ini sangat tergantung pada hasil pertanian, perkebunan sehingga menjadikan upaya pemerintah daerah maupun pusat untuk mensejahterakan masyarakat adalah melalui pengembangan sektor pertanian.

Dengan kondisi suhu udara berkisar antara 23 °C sampai dengan 34 °C dan luas wilayah 53,435 km<sup>2</sup> di antaranya sekitar 60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang menjadikan kawasan ini merupakan salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatra. Kelapa sawit dan karet menjadi tanaman perkebunan primadona dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 400.168 hektare serta karet mencapai 595.473 hektare. Sementara itu, nilai produksi kelapa sawit sebesar 898,24 ribu ton pertahun. Hasil perkebunan lainnya adalah karet, dengan jumlah produksi 240,146 ribu ton per tahun, kelapa dalam (*virgin coconut*) 119,34 ribu ton per tahun, casia vera 69,65 ribu ton per tahun, serta teh 5,6 ribu ton per tahun. Sementara produksi sektor pertanian yang dihasilkan oleh kawasan bagian barat Provinsi Jambi yaitu beras kerinci, kentang, kol/kubis, tomat dan kedele.

Potensi sektor kehutanan di Provinsi Jambi cukup besar mengingat luas wilayah kurang lebih 5 juta hektar dimana 2,1 juta hektar berupa hutan dan 0,6 juta hektar adalah lahan gambut. Dari 2,1 juta hektar hutan di Provinsi Jambi, kurang lebih 598.663 hektar sudah di bebani izin Hutan Tanaman Industri, Hutan Desa seluas 721.317 hektar dan hutan kemasyarakatan seluas 17.140 hektar. Walaupun pendistribusian izin pengelolaan kawasan hutan di Jambi sudah relatif berimbang antara perusahaan dan masyarakat namun konflik lahan atau tenurial di Provinsi Jambi relatif tinggi. Menurut data dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) konflik lahan di Provinsi Jambi berada di urutan ke-2 secara nasional setelah provinsi Riau. Oleh karena itu pada kesempatan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI menyempatkan melakukan diskusi dengan Gubernur Provinsi Jambi, Ketua DPRD, Panitia Khusus Konflik Lahan Provinsi Jambi dan Forkopinda Jambi untuk mencari solusi permanen permasalahan konflik lahan di Provinsi Jambi. Diskusi di Kantor DPRD Jambi juga di hadiri pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian.

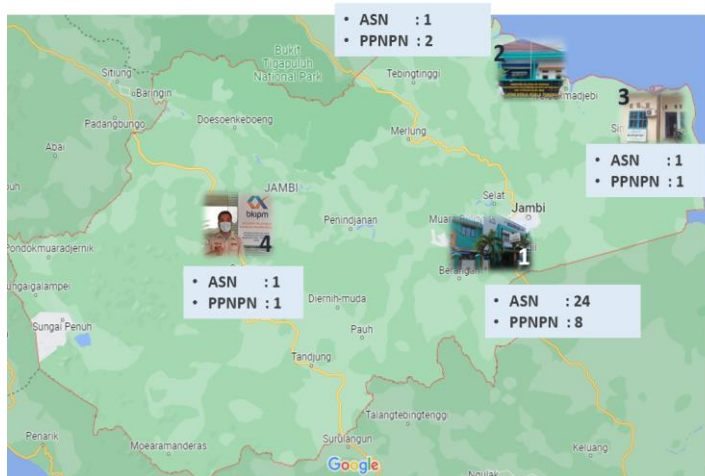
## **C. HASIL KUNJUNGAN KERJA**

### **1. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi.**

#### **a. Diskusi dan Kunjungan di SKIPM Jambi.**

Tugas Pokok Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Jambi meliputi 4 hal, antara lain; Pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, Penerapan sistem manajemen mutu dan Pengawasan keamanan hayati ikan. Untuk melaksanakan tugas nya SKIPM Jambi di bantu beberapa UPT Wilayah Kerja Kuala Tungkal, Muara Sabak dan Muara Bungo.

## Wilayah Kerja dan SDM ( Total SDM 39 ( ASN : 27 PPNPN : 12 )



1. UPT SKIPM Jambi

2. Wilayah Kerja Kuala Tungkal

3. Wilayah Kerja Muara Sabak

4. Wilayah Kerja Muara Bungo

Penerapan Sistem Jaminan Kesehatan Ikan di SKIPM Jambi dengan menerapkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). CKIB dilaksanakan untuk memastikan bahwa semua tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan. Sampai tahun 2022 sudah terdapat Instalasi Karantinasi Ikan (IKI) yang sudah memiliki sertifikat CKIB di Jambi. Sedangkan SKIPM Jambi dalam kegiatan Inspeksi dan Surveilans Lembaga Inspeksi telah terakreditasi SNI ISO 17020:2012.

SKIPM Jambi dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah dilengkapi dengan fasilitas laboratorium, yang terdiri dari laboratorium virus, laboratorium preparasi media, laboratorium bakteri, laboratorium mutu (Organoleptik) dan Laboratorium parasit dan jamur. Untuk kegiatan pengujian di laboratorium, SKIPM Jambi juga telah Terakreditasi SNI ISO 17025:2017.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, SKIPM melakukan kegiatan antara lain:

- 1) Digitalisasi Proses Sertifikasi.
- 2) Pembayaran PNBPN Non Tunai.
- 3) Penerapan PNBPN Nol Rupiah untuk Sertifikasi Domestik [PP85/2021].
- 4) Pencanaan ZI menuju WBK-WBBM SKIPM Jambi.
- 5) Pengembangan Inovasi PJK.

SKIPM Jambi dalam melakukan Tugas dan Fungsinya melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah, seperti Kepolisian Daerah Jambi, Bea Cukai, Dinas Perikanan di Provinsi Jambi dan Kabupaten, BPSPL, BKSDA, BBAT, PSDKP, Loka Konservasi, Angkasa Pura dan Universitas Jambi.

SKIPM Jambi mencatat beberapa komoditas perikanan unggulan yang masuk 10 besar yang dilalu lintaskan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

## 10 BESAR KOMODITAS DILALULINTASKAN PROVINSI JAMBI

### Ikan Hias Air Tawar

Siput hias
Udang hias
Seluang
Tali-tali
Coklat gurami
Botia
Susur Batang
Strip Lima
Tiger Fish
Goby

### Ikan Segar/Beku

Ikan Kembung
Ikan Bawal
Ikan Talang
Ikan Baung Laut
Udang Segar
Ikan Belanak
Ikan Manyung
Ikan Malong
Ikan Sebelah
Ikan Belanak

Menurut paparan dari Kepala SKIPM Jambi, komoditas unggulan perikanan dari Jambi adalah:

- Udang Belalang, yang berasal dari Kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Menyumbang 85-90% komoditas tujuan ekspor dari Provinsi Jambi, dengan tujuan Hongkong dan China Daratan (Jumlah 3.649.734 ekor, nilai Rp255.442.680.000,00 (dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Ikan Hias Alam, tujuan Singapura (Jumlah 3.444.776 ekor, nilai Rp12.283.425.947,00 (dua belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).
- Fresh Fish Product*, tujuan ekspor Malaysia dan Singapura via Pulau Moro dan Pulau Mas (Jumlah 1.172,35 ton, nilai Rp33.318.476.720,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

SKIPM dalam menjalankan tugas dan fungsi di lapangan khususnya untuk membantu meningkatkan volume dan nilai ekspor produk-produk pertanian dari Jambi memiliki beberapa kendala yaitu Belum ada penerbangan langsung ke luar negeri sehingga diperlukan direct-call ekspor komoditas perikanan dari Jambi, dan belum tercatatnya Ekspor Komoditas Unggulan dari Propinsi Jambi berupa Udang belalang, *Fresh Fish* dan Ikan Hias.

Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI melakukan diskusi dengan stakeholder perikanan dan kelautan di Provinsi Jambi di hadiri oleh Kepala BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jambi, serta beberapa Eselon I dari Kementerian

Pertanian yang menyertai Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI.

Pada kesempatan sambutan Kepala BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan apresiasi atas kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke SKIPM Jambi. Serta berharap momentum dapat digunakan untuk bersatu bergerak bersama dengan penuh optimisme menatap masa depan perikanan yang lebih baik di Provinsi Jambi. Sejalan dengan visi Presiden RI tahun 2019 – 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menimplementasikan hal tersebut untuk terwujudnya masyarakat perikanan dan kelautan yang sejahtera dan sumber daya perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju mandiri dan berdaulat yang berdasarkan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki misi Membangun struktur ekonomi produktif mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor Kelautan Perikanan dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

**b. Arahan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.**

Ketua dan Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI menyampaikan bahwa pengelolaan karantina masih di kelola masing masing oleh Kementerian, yaitu Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dalam pengadaan alat menjadi tidak maksimal. Seharusnya penyediaan sarana dan prasarana serta peralatan dapat digabungkan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai menjadi terbagi, sehingga terjadi inefektifitas dan inefisien dalam pemangfaatannya. Hal berikutnya yang menjadi perhatian adalah eselonering UPT Karantina di tingkat provinsi masih belum sesuai dengan tingkat beban kerja dan ruang lingkup kordinasi dan tanggung jawab yang menjadi tugasnya. Saat ini Eselon UPT karantina ikan Provinsi Jambi adalah Eselon IV sedangkan mitra-mitra kerja lain adalah Eselon III dan kepala dinas provinsi adalah Eselon II. Kedepan agar menjadi bahan pembicaraan antara DPR RI dan Kementerian KKP untuk mengkaji ulang bobot dan beban kerja unit Pelaksanan Teknis Pusatnya (UPT) sehingga mampu melaksanakan beban tugasnya dengan optimal sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang dihadapinya; antara lain dengan meningkatkan kelas eselon UPT Karantinasnya, karena fungsi karantina sangat penting sebagai garda terdepan dan palang pintu utama untuk melindungi kekayaan hayati yang dimiliki oleh negara dan sekaligus untuk melindungi masyarakatnya dari cemaran yang membawa bakteri, virus dan zat-zat berbahaya lainnya.

Menempatkan kegiatan dan Tindakan karantina sebagai aspek normatif untuk lalu lintas komoditas pertanian dan perikanan serta kehutanan harus segera ditinggalkan dan dirubah. Dengan menjadikannya sebagai kegiatan standar dalam melindungi kekayaan

hayati dan Kesehatan masyarakat bangsanya dari ancaman Hama dan penyakit karantina yang sangat membahayakan.

Selain menyampaikan arahan, beberapa anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI menyampaikan beberapa pertanyaan, antara lain:

- a) Penanganan virus seperti virus yang menyerang Ikan Koi di Sukabumi, apakah sudah di tangani dengan baik?
- b) Permasalahan pelayanan sertifikasi produk hasil perikanan, saat ini pemohon yang datang ke kantor dilayani proses sertifikasinya, sedangkan yang di luar (tidak datang ke kantor) bagaimana proses pelayanan sertifikasi produk?
- c) Komoditas perikanan yang sudah keluar dari Provinsi Jambi, mana saja komoditas yang berasal dari budi daya?
- d) Konsumsi ikan di beberapa daerah salah satunya di Provinsi Lampung cukup tinggi dan suplai ikan salah satunya berasal dari Jambi, apakah ikan-ikan yang dikirim sudah di sertifikasi.
- e) Bagaimana kasus-kasus penyelundupan Ikan Dori dari Vietnam ke Jambi, apakah diketahui oleh SKIPM Jambi karena masih banyak sekali kasus-kasus penyelundupan Ikan Dori melalui Jambi. Ikan Dori berasal dari Ikan Patin yang berukuran besar kemudian di potong-potong menjadi fillet dan di jual masuk ke hotel dan restoran-restoran.

Jawaban dari Kepala SKIPM Jambi;

- a) SKIPM Jambi menyapikan bahwa dalam upaya melindungi kekayaan ikan di provinsi Jambi dari ancaman hama dan penyakit karantina ikan, terutama untuk pada areal areal remote maka di Jambi dilakukan dengan cara mitigasi dan melakukan kordinasi dan komunikasi dengan dinas provinsi dan kabupaten untuk melakukan pemantauan dan kunjungan ke lapangan dan mengambil sample untuk di teliti di laboratorium. SKIPM juga melakukan sosialisasi dan diskusi dengan para pelaku usaha perikanan bagaimana melakukan budi daya ikan yang baik.
- b) Fasilitas pengujian virus konvensional di SKIPM sudah ada dan masih memadai digunakan, namun dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan perkarantinaannya maka dibutuhkan Real Time PCR untuk meningkatkan pelayanan dan pencegahan virus dan penyakit lainnya.
- c) Jalur rawan penyelundupan berada di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir. SKIPM pernah melakukan kerjasama dengan Bea Cukai untuk menangani penyelundupan ikan-ikan segar, bukan ikan dori.

## **2. Kunjungan Kerja di Sentra Produksi Nanas Tangkit Baru, Kec. Sei Gelam, Kab. Muaro Jambi.**

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Agrowisata nanas di Desa Tangkit Baru, Kec Sei Gelam, Kab Muaro Jambi. Luas pertanaman nanas di Provinsi Jambi sekitar 5000



hektar dan pertanaman terluas berada di Kabupaten Muaro Jambi. Desa Tangkit merupakan sentra pertanaman nanas terluas di kabupaten tersebut dan sekitar 200 Hektar hektar dikelola sebagai Kawasan Agrowisata Nanas dari sekitar kurang lebih 900 ha perkebunan nanas yang terdapat di desa tersebut.

Hampir semua warga memiliki kebun nanas dan komoditi ini menjadi komoditi andalan dari masyarakatnya. Setelah melakukan peninjauan dan melakukan panen nanas, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di dampingi oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Direktur Sriwijaya Palembang sebagai perwakilan dari PT Pupuk Indonesia (Persero), Direktur BULOG, dan beberapa pejabat Eselon II (dua) lingkup Kementerian Pertanian melakukan dialog dan diskusi dengan petani nanas untuk mendengar aspirasi dari para petani. Beberapa permasalahan dan rencana untuk mengembangkan budidaya nanas di Desa Tangkit baru antara lain:

- a) Infrastruktur jalan menuju lokasi agrowisata kurang baik.
- b) harga pupuk dan obat-obatan yang cukup tinggi, dan
- c) Tidak adanya STA (Stasiun Terminal Agribisnis).

Menanggapi aspirasi dari petani khususnya harga pupuk yang cukup tinggi dan pembangunan Stasiun Terminal Agribisnis, Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Dirjen Hortikultura menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian siap memfasilitasi pembangunan STA dengan syarat lahan yang akan digunakan dan kelembagaannya harus jelas. Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil menjanjikan untuk segera merealisasikan infrastruktur dan pengalokasina Pupuk Bersubsidi untuk komoditas nanas.

Selanjutnya Ketua dan Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI menyampaikan arahan sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur menuju agrowisata nanas perlu dibenahi dan patut dikembangkan, karena nanas yang berada di Desa Tangkit Baru sudah dikenal sebagai salah satu keunggulan dan komoditas kebanggaan Jambi, dan menjadi salah satu ikon di sektor pertanian daerah tersebut.
- 2) Agrowisata nanas di Desa Tangkit Baru harus di bantu dan dikembangkan menjadi destinasi wisata sehingga dapat memberi manfaat dan nilai tambah setempat dan bagi masyarakat sekitar.
- 3) Rencana pembangunan Stasiun Terminal Agribisnis perlu segera direalisasikan dalam rangka untuk menyelesaikan perbedaan harga jual nanas antar petani dan persaingan/perang harga di tingkat petani, namun terhadap pembangunan terminal agribisnis tersebut maka perlu dipastikan siapa yang akan mengelola dan bertanggung jawab atas stasiun terminal agribisnis. Agar keberadaan terminal buah akan menambah produktifitas, sirkulasi, serta penghasilan, yang nantinya berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat para petani khususnya,

### 3. Diskusi Konflik Lahan di Kantor DPRD Provinsi Jambi.

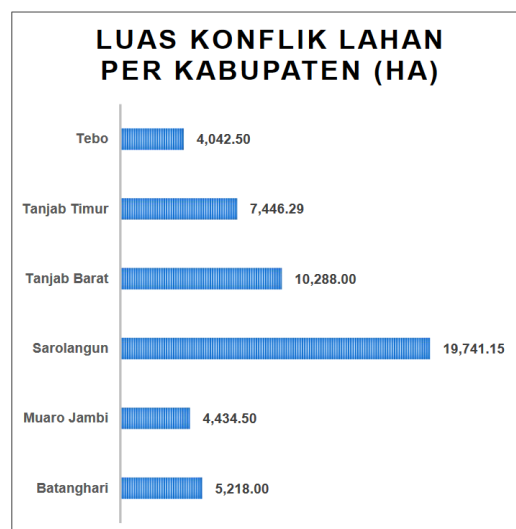
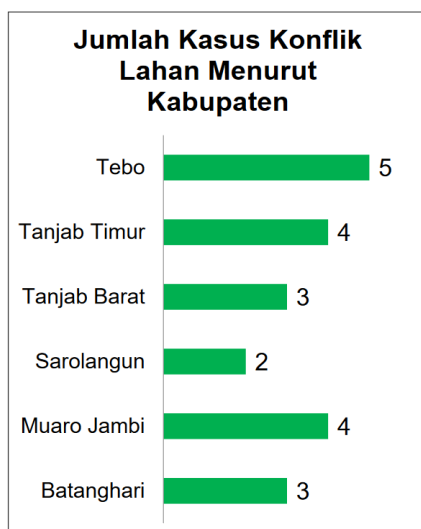
Permasalahan konflik lahan di Provinsi Jambi sangat tinggi dan menyebabkan kerugian material dan nonmaterial. Tingginya konflik juga menyebabkan iklim investasi menjadi tidak baik dan merugikan Pemerintah Provinsi Jambi secara langsung. Oleh karena itu DPRD Jambi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan permasalahan konflik lahan di Provinsi Jambi. Pada kesempatan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Jambi melakukan diskusi untuk menyelesaikan konflik lahan yang ada di Provinsi Jambi. Diskusi bertempat di Kantor DPRD Jambi dan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Jambi, Ketua DPRD Jambi, Tim Pansus Konflik Lahan DPRD Jambi, Forkompinda Jambi, Pejabat eselon 1 (satu) dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Kantor ATR/BPN serta perwakilan warga masyarakat Jambi yang mengalami konflik.

Pansus Konflik Lahan DPRD Jambi menyampaikan pemaparan hasil kerja pansus saat ini antara lain:

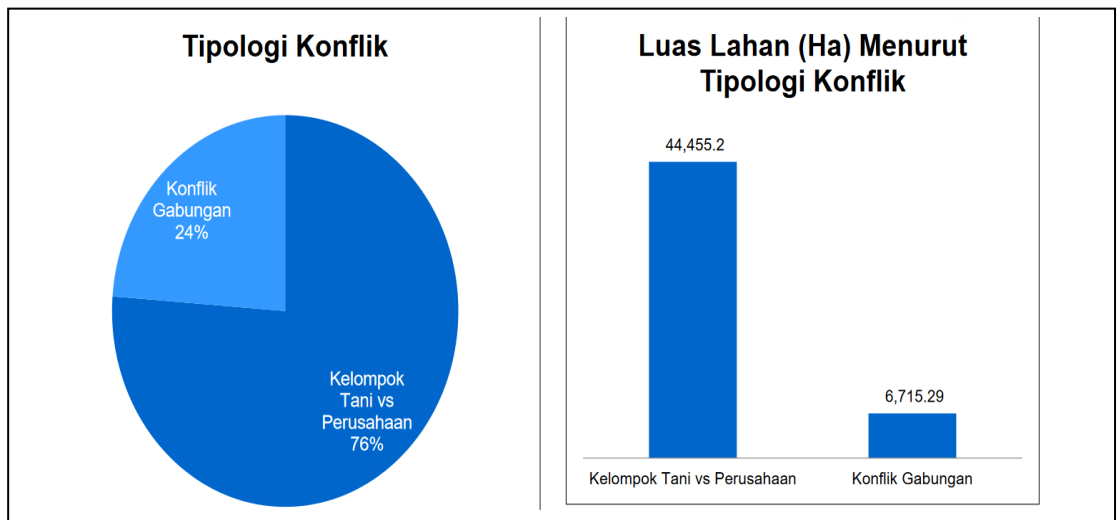
- a. Latar Belakang dan Tujuan Pansus
- b. Jumlah Konflik Lahan menurut Kabupaten, Jumlah Kasus dan Luas Lahan.

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Kasus	Luas Lahan
1	Batanghari	3	5.218,00
2	Muaro Jambi	4	4.434,50
3	Sarolangun	2	19.741,15
4	Tanjab Barat	3	10.288,00
5	Tanjab Timur	4	7.446,29
6	Tebo	5	4.042,50
Jumlah		21	51.170,44

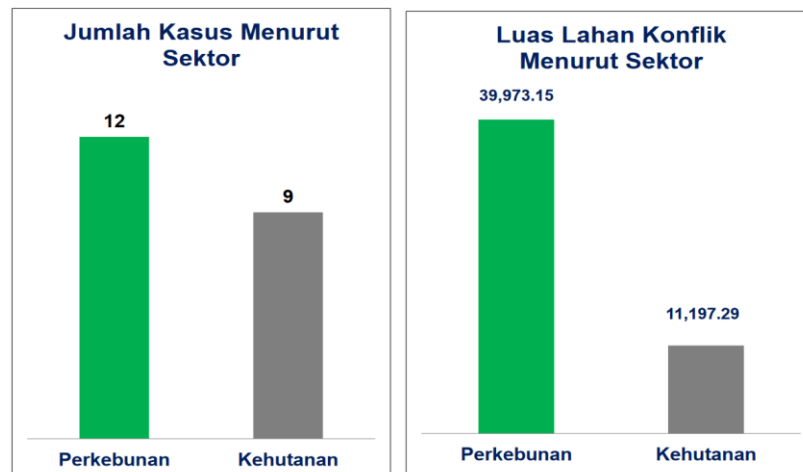
- c. Jumlah Kasus dan Luas Lahan Konflik.



d. Tipologi Konflik



e. Konflik Lahan Menurut Sektor



f. Konflik Lahan Menurut Perusahaan.

No	Perusahaan	Jumlah Kasus	Kab/Kota	Luas Lahan	Sektor
1	PT WKS	6	Tanjab Barat, Tanjab Timur, Muaro Jambi, Batanghari, Tebo	9.963,29	Kehutanan
2	PT FPIL	1	Muaro Jambi	322	Perkebunan
3	PT DAS	1	Tanjab Barat	9.077	Perkebunan
4	PT TI	1	Tebo	22,50	Perkebunan
5	PT SKU	1	Tebo	81	Perkebunan
6	PT LKU	1	Tebo	700	Kehutanan
7	PT KU	1	Tanjab Timur	3.470	Perkebunan
8	PT CMM	2	Tebo & Batanghari	1.907	Perkebunan
9	PT KKL	1	Muaro Jambi	1.008,50	Perkebunan
10	PT SAL	1	Sarolangun	19.701,15	Perkebunan
11	PT BSU	1	Batanghari	3.550	Perkebunan
12	PT BBIP	2	Tanjab Timur	834	Perkebunan
13	PT RHM	1	Muaro Jambi	494	Kehutanan
14	PT APTP	1	Sarolangun	40	Kehutanan
Jumlah		21	6	51.170,44	2

Pokok-pokok permasalahan yang di temui oleh Pansus setelah melakukan serangkaian kegiatan dan diskusi dengan para pihak antara lain:

- a) Kemitraan yang tidak terealisasi oleh perusahaan kepada masyarakat.
- b) Realisasi kewajiban minimal 20% fasilitasi pembangunan usaha kebun masyarakat oleh perusahaan (di dalam dan di luar IUP dan HGU) yang tidak terpenuhi.
- c) Tumpang tindih legalitas dan kepemilikan lahan/Sertifikat Atas Tanah
- d) Mafia pertanahan
- e) Pencabutan dan evaluasi izin HGU Perkebunan
- f) Pencabutan dan evaluasi izin usaha konsesi kawasan hutan.
- g) Klaim hutan adat, hutan desa dan pelepasan lahan (*Inclave*).
- h) Kegiatan perkebunan di luar area HGU dan izin usaha konsesi kawasan hutan.
- i) Penegasan batas areal kerja Kelompok Tani dengan Perusahaan.
- j) Penyerobotan dan pengurusan lahan dan tanaman.
- k) Pengelolaan dan pemanfaatan Area Penggunaan Lain (APL).

Berkaitan dengan masalah tersebut DPRD Jambi yang telah membentuk Pansus Konflik Lahan. Setelah mendengarkan paparan dari ketua pansus, Ketua dan Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI menyampaikan arahan sebagai berikut:

Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI mengapresiasi atas langkah DPRD Provinsi Jambi yang telah membentuk pansus konflik lahan khususnya terkait konflik di kawasan hutan dan perkebunan. Melalui diskusi yang dilaksanakan Komisi IV DPR RI telah menerima 107 laporan konflik lahan di Provinsi Jambi dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikannya.

- Setelah rekomendasi Pansus Konflik Lahan diparipurnakan oleh DPRD Jambi, maka hasil Pansus beserta dokumen yang lengkap agar di sampaikan ke Komisi IV DPR RI untuk ditindaklanjuti.
- Pansus Konflik Lahan DPRD Jambi agar bekerjasama dan bersinergi dengan semua stakeholder khususnya di daerah, seperti Forkominda, UPT-UPT pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat agar permasalahan konflik lahan bisa diselesaikan dengan baik kepentingan masyarakat demi mewujudkan keadilan sosial.
- Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk mengawal dan mendukung hasil kerja Pansus DPRD Jambi sebagai amanat konstitusi yaitu mewujudkan keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan umum.

#### **4. Kunjungan Lapangan ke Lokasi Konflik Tanah di Desa Danau Lamo, Kecamatan Muarosebi, Kabupaten Muaro Jambi.**

Sebagai suatu rangkaian kegiatan diskusi di Kantor DPRD Jambi, Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan lapangan dan berdialog dengan Kelompok Tani di Desa Danau Lamo, Kabupaten Muaro Jambi, yang bersengketa dengan PT WKS. Sengketa antara Kelompok Tani Pantang Mundur dan termasuk dalam Persatuan Petani Jambi di Desa Danau Lamo dengan PT WKS adalah salah satu konflik

lahan yang di laporkan ke Pansus DPRD Jambi. Konflik lahan bermula dari lahan milik warga yang masuk dalam kawasan hutan produksi dan kemudian di bebani izin HTI PT WKS. Konflik antara warga dengan PT WKS sudah berlangsung lama dan telah beberapa kali dilakukan mediasi termasuk kesepakatan yang di kawal oleh Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA), Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, namun sampai saat ini belum ada solusi pasti yang di terima oleh masyarakat. Terkait tawaran solusi perhutanan sosial berupa kemitraan kehutanan, perwakilan masyarakat yang hadir menolak karena merugikan dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Atas aspirasi dan konflik tanah yang dilaporkan oleh warga, Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk mengawal dan membela rakyat namun tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Komisi IV DPR RI telah mendengar keluhan apa yang dimaksud masyarakat dan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti permasalahan yang di laporkan dan meminta tanggal 20 Mei 2022 yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional sudah ada solusi permanen atas konflik warga dengan PT WKS.

#### IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan status Eselon UPT SKIPM yang semula setingkat Eselon IV menjadi setingkat Eselon II. Komisi IV DPR RI mendukung peningkatan status UPT dan peningkatan anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Karantina Perikanan dalam rangka mencegah, mengawasi dan melindungi produk-produk perikanan dari serangan bakteri, virus dan zat-zat berbahaya lainnya
2. Komisi IV DPR RI akan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan meningkatkan pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan pengawasan kawasan laut Indonesia serta mencegah terjadinya penyelundupan dan *illegal fishing*.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Jambi dan Kementerian Pertanian bekerjasama untuk mendukung Agrowisata Nanas Khususnya di Desa Tangkit Baru Kec. Sei Gelam, Kab Muaro Jambi dengan memperbaiki infrastruktu jalan, membangun Stasiun Terminal Agrobisnis serta membantu penyediaan pupuk subsidi untuk petani nanas.
4. Komisi IV DPR RI mengapresiasi DPRD Provinsi Jambi yang sudah membentuk Pansus Konflik Lahan dan Komisi IV DPR RI Komisi IV DPR RI telah menerima 107 laporan konflik lahan di Provinsi Jambi dan berkomitmen untuk membantu menyelesaikannya.
5. Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk mengawal dan mendukung hasil kerja Pansus DPRD Jambi sebagai amanat konstitusi yaitu mewujudkan keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan umum. Komisi IV DPR RI meminta rekomendasi Pansus Konflik Lahan setelah diparipurnakan oleh DPRD Jambi agar di sampaikan ke Sekretariat Komisi IV DPR RI untuk ditindaklanjuti dan di bahas bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian.
6. Komisi IV DPR RI telah mendengar keluhan dan aspirasi Kelompok Tani Pantang Mundur, Desa Danau Lamo, Kabupaten Muarojambi yang berkonflik dengan PT WKS dan Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk mengawal dan

membela rakyat namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti permasalahan konflik warga Desa Danau Lamo, Kabupaten Muarojambi dengan PT WKS dan meminta tanggal 20 Mei 2022 yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional sudah ada solusi permanen atas konflik tersebut.

## V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2021-2022 ke Daerah Provinsi Jambi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 22 April 2022

Ketua Tim,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Kunjungan di SKIPM Jambi



Kunjungan di Sentra Produksi dan Agrowisata Nanas





Diskusi Konflik Tanah Di Kantor DPRD Jambi



Kunjungan Ke Lokasi Konflik Tanah Di Desa Danau Lamo





## LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

1. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38700/t/Komisi+IV+Dorong+Peningkatan+Keamanan+Badan+Karantina+Sebagai+Pintu+Masuk+Keluarnya+Penyakit+Berbahaya>
2. <https://jambi.tribunnews.com/2022/04/19/kunjungi-skipm-jambi-edi-purwanto-sebut-anggota-dpr-ri-bahas-mutu-ikan-budidaya-dan-penyeludupan>
3. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38714/t/Agrowisata+Nanas+Jambi+Patut+Dikembangkan+>
4. <https://jambi.tribunnews.com/2022/04/19/edi-purwanto-ajak-komisi-iv-dpr-ri-kunjungi-sentral-nanas-di-tangkit>
5. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/38720/t/Komisi+IV+Apresiasi+Pembentuk+an+Pansus+Konflik+Kawasan+Hutan+dan+Perkebunan+oleh+DPRD+Jambi>
6. <https://radarjambi.co.id/read/2022/04/18/28373/dukung-pansus-konflik-lahan-komisi-iv-dpr-ri-kunker-ke-dprd-provinsi-jambi/>
7. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6040896/bentuk-pansus-konflik-lahan-dprd-jambi-diapresiasi-komisi-iv-dpr-ri>
8. <https://otomotif.antaranews.com/video/2828397/komisi-iv-dpr-terima-107-laporan-konflik-lahan-di-jambi>
9. <https://imcnews.id/read/2022/04/20/19187/dpr-ri-minta-kementerian-panggil-perusahaan-yang-berkonflik-/>
10. <https://ditjenbun.pertanian.go.id/pemerintah-dan-stakeholder-terkait-komit-selesaikan-konflik-di-kawasan-hutan-dan-perkebunan-provinsi-jambi/>
11. <https://tribrataneews.jambi.polri.go.id/main/detail/1426/Kapolda-hadiri-diskusi-bersama-penyelesaian-konflik-lahan-di-Provinsi-Jambi>
12. <https://zabak.id/komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-kinerja-pansus-konflik-lahan-dprd-provinsi-jambi/>
13. <https://serambijambi.id/2022/04/19/bersama-komisi-iv-dpr-ri-kapolda-jambi-bahas-penyelesaian-konflik-di-kawasan-hutan-dan-perkebunan/>
14. <https://batangharinews.com/read/2022/04/20/4303/-ketua-dan-anggota-dprd-provinsi-jambi-dampingi-komisi-iv-kunjungan-lapangan>
15. <https://risalahterkini.com/2022/04/19/ketua-dan-anggota-dprd-provinsi-jambi-dampingi-kelompok-tani-dialog-dengan-komisi-iv-dpr-ri/>